

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, tepatnya di tahun 1998 dimana perekonomian Indonesia mengalami krisis, perbankan Indonesia mengalami masa-masa yang menyulitkan. Situasi tersebut terjadi pada saat Indonesia mengalami krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter inilah dimulai pada pertengahan tahun 1998, kesulitan likuiditas yang dialami lembaga perbankan akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merupakan pemicu krisis yang dialami pada saat itu. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut menyebabkan perbankan Indonesia sulit untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai lembaga keuangan Negara. Keadaan perbankan yang semakin tidak sehat menyebabkan situasi yang dialami oleh perbankan semakin memburuk (Topowijono,dkk,2014). Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat mulai hilang dan semakin banyaknya masyarakat yang menarik dananya dari bank, padahal apabila dilihat dari aspek perkembangan bank tersebut boleh dikatakan bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Setelah peristiwa tersebut, bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat baik dari kuantitas maupun kualitas. Perkembangan tersebut didukung dari upaya pemerintah dengan menciptakan Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memberikan izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dan diperkuat oleh terbitnya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lestari, 2014)

Tabel 1.1

Tabel 5. Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah (Number of Worker in Islamic Banking)																			
Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015						Indicator	
						Jun ¹⁾	Jul ¹⁾	Agus ¹⁾	Sep ¹⁾	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei		Jun ¹⁾
Bank Umum Syariah	10,348	15,224	21,820	24,111	26,717	29,232	39,338	38,807	38,965	40,272	40,590	41,393	49,086	49,101	49,106	49,587	38,307	38,307	Islamic Commercial Bank
Unit Usaha Syariah	2,296	1,868	2,067	3,108	11,511	14,811	4,366	4,431	4,428	4,443	4,419	4,425	4,598	4,591	4,365	4,404	4,414	4,414	Islamic Business Unit
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	2,799	3,172	3,773	4,359	4,826	4,894	4,863	4,915	4,853	4,696	4,727	4,704	4,903	4,642	4,651	5,000	4,808	4,808	Islamic Rural Bank
1) Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMK																			
1. "Revision of data BUS-UUS began in May 2014 based on LSMK"																			

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (*Sharia Banking Statistics*), Juni 2015

Data statistik Bank Indonesia pada tabel diatas menunjukkan pada tahun 2009 hingga 2013 Bank Pembiayaan Rakyat mengalami peningkatan karyawan di perbankan syariah. Peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa bank syariah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediasi* keuangan di masyarakat. Tetapi memasuki tahun 2014 hingga 2015 jumlah pekerja Bank Pembiayaan Rakyat mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap pergantian bulan. Hal ini, berarti Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) mengalami pemerosotan dan sangat berbeda dengan jumlah pekerja dari BUS (Bank Umum Syariah) yang semakin terus meningkat.

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) ini semakin dikuatkan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 yang menekankan bahwa sasaran BPR adalah melayani usaha kecil. Perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam yang sangat *Compatible* dengan ketimpangan social, kemiskinan, dan ketidakadilan social ekonomi. Dalam mengemban misi tersebut, tidak berarti BPRS mengabaikan kesehatan usaha bank itu sendiri, melainkan keduanya

harus berjalan secara proporsional. Hasil akhir penilaian dapat digunakan BPRS sebagai sarana menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang dan bagi BI dapat digunakan sebagai sarana penetapan strategi pembinaan dan pengawasan (Anita,2010).

Dengan semakin ketatnya persaingan antara bank syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing untuk memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia (Kusumo,2008). Selain itu, dengan semakin baiknya kinerja bank itu sendiri maka hal itu akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama nasabah terhadap bank tersebut (Setiaji,2011).

Kinerja perbankan adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Agar perusahaan dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka bank harus sehat, karena OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terus melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kesehatan bank untuk mencegah terulangnya masalah saat masa krisis 1998 (Setiaji,2011). Dari ulasan diatas apabila perusahaan memiliki kinerja yang baik berarti, perusahaan tersebut memiliki pencapaian akhir yang baik.

Dalam syariah kinerja bank syariah terbagi menjadi dua sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi bisnis (tijarah) dan fungsi social (tabarru'). Baik fungsi bisnis maupun fungsi social, keduanya memerlukan pengukuran kinerja untuk melihat seberapa besar komitmen bank syariah dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Pengukuran kinerja bank bermanfaat sebagai alat pengevaluasian dalam menentukan kebijakan di masa depan dengan melihat kinerja di masa lalu. Seperti dalam Al-Quran surat Al Hasyir ayat 18 yang artinya : *"hai orang-*

orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Lestari,2014). Maka dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa melalui penilaian kinerja manajemen dan perusahaan, kita bisa memperbaiki kekurangan dimasa lalu untuk kemajuan kinerja di masa depan.

Menurut peraturan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi BI No 30/11/KEP/DIR pada tahun 1997 dan Surat Keputusan Direksi BI No 30/277/KEP/DIR tahun 1998 serta surat edaran Bank Indonesia Nomor 06/23/DPNP, 31 mei 2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan ini menyebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, seperti faktor permodalan (*Capital*), kualitas asset (*Asset Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), likuiditas (*Liquidity*) dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*) dengan melihat profil risiko pasar dan manajemen risiko pasar yang dilaporkan bank. Perubahan aktivitas perbankan untuk beberapa tahun terakhir yang membuat para pemilik perbankan harus menerapkan manajemen resiko dan good corporate governance dalam setiap aktivitasnya supaya suatu saat bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dideteksi sejak dini sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar (Agustina,2014).

Oleh karena itu, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian kesehatan dari CAMELS menjadi RGEC sesuai dengan SE BI nomor 13/ 24 /DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/ 2011. Peraturan ini efektif digunakan oleh seluruh Bank umum sejak 1 Januari 2012. RGEC meliputi indikator penilaian Risk Profile, Earnings, Good Corporate government, dan Capital (Kusumawardani,2014).

Selain metode RGEC terdapat pula pendekatan *Islamicity Performance Index* untuk melihat kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada dunia perbankan syariah. Dalam UU No. 21 tahun 2008 pada pasal 4 dipertegas bahwa selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang harus dijalankan yaitu pertama dalam bentuk lembaga baitul maal yang meneima zakat, infak, dan shodaqoh, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi zakat, kedua dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola yang ditunjuk. (Haq,2015). Untuk mengukur kinerja social ini dapat menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index* (IPI) dengan rasio yang meliputi profit sharing ratio, qardh ratio, equitable performance ratio (EDR).

Bantuan dana penyertaan modal senilai Rp 5 miliar yang dikucurkan Pemkab Sampang kepada PT Bakti Artha Sejahtera Sampang (BAS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), ditolak oleh DPRD Sampang. Dasar penolakan Dewan terhadap bantuan dana penyertaan modal tersebut, karena sampai saat ini tidak ada payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagai pijakan hukum dalam pengucuran bantuan dana itu (koranmadura.com).

Beralih ke Pamekasan, rencana pendirian BPRS terkatung-katung. Pasalnya, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur rencana

tersebut. padahal sesuai petunjuk Bank Indonesia (BI), peraturan daerah (perda) menjadi syarat pendirian BPRS. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan Taufikurrachman mengungkapkan, BPRS harus memiliki dana awal sebesar Rp 2 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan Pemkab setelah ada perda yang mengatur (radarmadura.com).

Sedangkan BPRS Bhakti Sumekar semakin menunjukkan eksistensi sebagai institusi keuangan syariah terbaik di tanah air. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu kembali mendapatkan penghargaan dalam ajang *The Best Sharia Finance Institutions 2015* versi Infobank. Penghargaan tersebut diraih pada kategori kinerja keuangan sangat bagus perusahaan dengan aset diatas Rp 100 miliar. Penghargaan tersebut diraih berturut-turut sejak tahun 2012. Perolehan itu diperoleh berkat kinerja sepanjang tahun yang terus menunjukkan tren positif (Radarmadura.co.id- Jawa Pos Radar Madura).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Artyka (2010) tentang Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank BRI dengan menggunakan metode RGEC sangat menunjukkan predikat kesehatan bank yang sesuai dengan Bank Indonesia, dan pada tahun 2011 hingga 2013 peringkat komposit Bank BRI "SANGAT SEHAT". Dan pada tingkat kesehatan bank dari aspek *risk profile*, *earnings*, *good corporate governance* dan *capital* pada Bank BRI tahun 2011 hingga 2013 sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Esti Putri (2013) “Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC pada Perusahaan Perbankan Besar dan Kecil”. Metode yang digunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil. Secara parsial faktor profil risiko dan GCG menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan bank kecil. Sedangkan faktor rentabilitas dan permodalan menunjukkan hasil yang sebaiknya. Proksi yang beragam dan jangka waktu yang diperpanjang berpotensi akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penelitian.

Berdasarkan acuan diatas, pengukuran kinerja keuangan menggunakan indikator RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) dan pada kinerja syariah digunakan indikator *Islamicity Performance Index* (IPI) yaitu, *profit sharing ratio, qardh ratio, equitable performance ratio* (EDR). Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul: **“Perbandingan Pengukuran Tingkat Kesehatan Dan Penerapan Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Madura yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) Tahun 2013-2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode RGEC ditinjau dari Risk Profile untuk rasio NPF dan FDR pada tahun 2013-2015?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode RGEC ditinjau dari Earnings untuk rasio ROA dan BOPO pada tahun 2013-2015?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode RGEC ditinjau dari Capital pada tahun 2013-2015?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara *shariah compliance* pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode *Islamicity Performance Index* (IPI) ditinjau dari Rasio PSR, Rasio Qardh, Rasio EDR1, dan Rasio EDR2 pada tahun 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membandingkan kondisi tingkat kesehatan pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode RGEC ditinjau dari Risk Profile untuk rasio NPF dan FDR pada tahun 2013-2015.
2. Membandingkan kondisi tingkat kesehatan pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode RGEC ditinjau dari Earnings untuk rasio ROA dan BOPO pada tahun 2013-2015.
3. Membandingkan kondisi tingkat kesehatan pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode RGEC ditinjau dari Capital pada tahun 2013-2015.
4. Membandingkan kondisi pengukuran *shariah compliance* pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan PT. BPRS Bakti Sumekar Sumenep dilihat dari metode *Islamicity Performance Index* (IPI) ditinjau dari Rasio PSR, Rasio Qardh, Rasio EDR1, dan Rasio EDR2 pada tahun 2013-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir dan syarat wajib untuk menempuh jenjang strata 1 akuntansi serta untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu perbedaan antar perusahaan.

2. Bagi Akademis atau Pembaca

Penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu bagi para pembaca dan dapat mengembangkan wawasan para pembaca serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan studi lebih lanjut.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi evaluasi bagi pengelola bank, yakni Pemilik, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi untuk mengetahui kekurangan yang dihadapi bank sehingga dapat diambil kebijakan yang dapat meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya.